J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Desentralisasi Dan Demokratisasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Kampung Majener Kabupaten Sorong

Mohamad Saleh Refra[1], Ismail Munadi Sangadji[2]
[1]Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong
[2]Ilmu Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong
E-mail: salehrefra7@gmail.com

Article History:
Received: 19 Maret 2025
Revised: 20 April 2025
Accepted: 24 April 2025

Kata Kunci: *Desentralisasi, Demokratisasi, Pemerintah Daerah, Pembangunan, Kampung Majener Kabupaten Sorong.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desentralisasi dan demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan kampung Majener kabupaten Sorong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong, secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki yaitu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat kampung Majener dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka dan rencana melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung Majener tidak dapat dipraktikan. Penelitian ini menyarankan penerapan praktik upaya-upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener yaitu, pemberdayaan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar pemerintah daerah dan inovasi teknologi sehingga berdampak terhadap pembangunan kampung Majener.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan demokratisasi merupakan dua pilar penting dalam sistem pemerintahan modern yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, responsif, dan efektif. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya, merencanakan pembangunan, serta menentukan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, demokratisasi menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

Desentralisasi dan Demokratisasi bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap tuntutan lokal, dan mendekatkan pilihan-pilihan pemerintah kepada masyarakat (Simanjuntak, 2015). Otonomi daerah dimungkinkan oleh prinsip-prinsip dasar desentralisasi dan demokratisasi dalam sistem politik. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

memutuskan hal-hal yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warganya, termasuk Kampung Majener, Kabupaten Sorong. Mereka dapat melakukan hal ini dengan menerapkan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi serta memantau perkembangannya.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi dan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah, termasuk hingga tingkat kampung, untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi lokal melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah kampung kini memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik lokal.

Kampung Majener, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sorong, merupakan representasi dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kampung-kampung lain di wilayah Papua Barat Daya dalam konteks pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, pemerintah kampung dituntut mampu menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Dalam kerangka tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diintegrasikan dalam praktik pembangunan di Kampung Majener. Selain itu, perlu juga dianalisis bagaimana kebijakan desentralisasi benar-benar memberikan ruang kemandirian bagi kampung dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan kampung yang ideal serta sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan kampung berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana desentralisasi dan demokratisasi pemerintah berpengaruh terhadap pembangunan Kampung Majener. Fokus utama diarahkan pada peran pemerintah kampung, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan kampung yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sorong

Salah satu tahap penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah program Desentralisasi dan Demokratisasi, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah untuk mengawasi sumber daya dan pembangunan daerah (Nuradhawati, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong, dengan upaya-upaya peningkatan otonomi daerah serta dampaknya terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendalami dan menggali informasi mengenai Desentralisasi dan Demokratisasi terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong. Pendekatan kualitatif di pilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengungkapkan berbagai perspektif yang ada dalam konteks pendidikan tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah daerah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong. Penelitian ini akan menggali

pandangan masyarakat kampung Majener mengenai Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah daerah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong, dengan upaya-upaya peningkatan otonomi Pemerintah daerah serta dampaknya terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong.

Berdasarkan data yang di kumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh:

a. Desentralisasi di kampung Majener kabupaten Sorong

Desentralisasi di kampung Majener kabupaten Sorong sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi desentralisasi. Menurut masyarakat kampung Majener kabupaten Sorong , sebagian besar kebijakan desentralisasi sudah disusun dengan jelas, terutama dalam pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, beberapa masyarakat mengeluhkan kurangnya kebijakan yang bijaksana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kampung majener.

b. Demokratisasi di kampung Majener kabupaten Sorong

Demokrasi menjadi ruang yang di berikan oleh otonomi daerah kepada masyarakat kampung Majener. kurangnya pemberdayaan masyarakat kampung Majener dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka, sehingga partisipasi masyarakat kampung Majener dan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung Majener tidak dapat dipraktikan.

c. Upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener kabupaten Sorong

Upaya-upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener yang akan dilakukan dan diharapkan dampaknya terhadap pembangunan kampung Majener yaitu, pemberdayaan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar pemerintah daerah dan inovasi teknologi.

Pembahasan

a. Desentralisasi di kampung Majener kabupaten Sorong

Pemerintah daerah Sebaiknya melakukan kajian terkait kebijakan yang bijaksana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat kampung majener yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kampung majener. Karena sebagian besar kebijakan Desentralisasi sudah disusun dengan jelas, terutama dalam pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Demokratisasi di kampung Majener kabupaten Sorong

Ruang Demokrasi dikampung majener memerlukan keterlibatan masyarakat kampung Majener dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka, sehingga partisipasi masyarakat kampung Majener dan pemerintah dalam merencanakan

dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung Majener dapat dipraktikan.

c. Upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener kabupaten Sorong

Penerapan praktik upaya-upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah terhadap pembangunan kampung Majener yang dampaknya terhadap pembangunan kampung Majener yaitu, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada penduduk kampung Majener dan pegawai pemerintah daerah, pemberdayaan sumber daya manusia dapat tercapai. Melibatkan warga kampung Majener dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan akan membantu mereka untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Akuntabilitas dan transparansi dengan meningkatkan sistem akuntabilitas dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dengan melibatkan masyarakat kampung Majener dan melakukan audit secara berkala untuk mengawasi penggunaan anggaran, mencegah salah urus keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pengembangan potensi lokal melalui pertumbuhan industri lokal yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Agar ekonomi masyarakat kampung Majener dapat berkembang dan tumbuh, penting untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan, serta mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberikan akses modal, pelatihan, dan pemasaran produk. kerja sama antara pemerintah daerah di tingkat regional untuk memecahkan masalah bersama, bertukar sumber daya, dan melaksanakan inisiatif pembangunan yang lebih efektif dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Kerja sama ini harus dilakukan dengan penuh komitmen dan harmonis. Untuk membantu masyarakat Majener belajar dari satu sama lain dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam inisiatif pembangunan mereka, pemerintah daerah harus didorong untuk berbagi keahlian baik di dalam maupun di luar negeri. Inovasi teknologi dalam pengembangan kampung majener yang lebih maju melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintah daerah, terutama dalam sistem pengawasan elektronik, layanan publik online, dan pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi dan Demokratisasi pemerintah terhadap pembangunan dikampung Majener kabupaten Sorong, secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki yaitu, Pemerintah daerah Sebaiknya melakukan kajian terkait kebijakan yang bijaksana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat kampung majener yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kampung majener. Karena sebagian besar kebijakan Desentralisasi sudah disusun dengan jelas, terutama dalam pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Ruang Demokrasi dikampung majener memerlukan keterlibatan masyarakat kampung Majener dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah mereka, sehingga partisipasi masyarakat kampung Majener dan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kampung Majener dapat dipraktikan.

Penerapan praktik upaya-upaya peningkatan otonomi pemerintah daerah yang

dampaknya terhadap pembangunan kampung Majener sebagai berikut :

a. pemberdayaan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada penduduk kampung Majener dan pegawai pemerintah daerah, pemberdayaan sumber daya manusia dapat tercapai.

b. Transparansi dan akuntabilitas dengan meningkatkan sistem akuntabilitas dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan melibatkan masyarakat kampung Majener mengawasi penggunaan anggaran.

c. Pengembangan potensi lokal melalui pertumbuhan industri lokal yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Agar ekonomi masyarakat kampung Majener dapat berkembang dan tumbuh dengan mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran produk.

d. kolaborasi antar pemerintah daerah untuk membantu masyarakat kampung Majener belajar dari satu sama lain dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam inisiatif pembangunan mereka, pemerintah daerah harus didorong untuk berbagi keahlian baik di dalam maupun di luar negeri.

e. **Inovasi teknologi** dalam pengembangan kampung Majener yang lebih maju melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintah daerah, terutama dalam sistem pengawasan elektronik, layanan publik online, dan pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Aziz, N. L. L. (2020). Membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Masyarakat Indonesia.

Khoiriza, M. N. (2016). *Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara Menyeluruh Menurut UU No. 6 Tahun 2014*. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

Labat, G. S. M., Suaib, M. R., & Hidaya, N. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada Distrik Salawati Kabupaten Sorong*. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik*, vol. 1, no. 1, 2013, pp. 1–21.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Academia Praja.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Nugroho, S. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 2, 2013, pp. 258–259.

Potolau, M. J. N., Safriansyah, & Tamrin, S. H. (2024). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sorong*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Cendekia Jaya

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia.

Saprianto, R., Simbolon, T., & Hukom, A. (2023). *Implikasi Otonomi Daerah pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan